BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki pemerintah yang bersih ekonomis, efektif, dan transparan sesuai pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dearah yang digunakan sebagai dasar bagi serangkaian reformasi kelembagaan dalam menciptakan *good governance*. Bentuk respon kesadaran tersebut dibuktikan dengan munculnya aspirasi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, selain itu juga memiliki standar mutu untuk mengukur keberhasilan kinerja. Dengan kata lain, kinerja instansi pemerintah kini lebih banyak mendapat sorotan, karena masyarakat mulai mempertanyakan manfaat yang mereka peroleh atas pelayanan instansi pemerintah (Permana, 2017).

Perkembangan organisasi yang semakin pesat menuntut pemerintah agar melakukan kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Kinerja pemerintah dikatakan baik dapat dilihat dari tingkat pencapaian hasil yang dilaksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja suatu organisasi yang telah dilaksanakan dengan tingkat pencapaian hasil tertentu, harus sesuai dengan visi dan misi

organisasi yang telah ditetapkan sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas yang harus dipertanggungjawabkan (Mahsun, 2006). Pengukuran kinerja pemerintah merupakan hal yang sangat penting, karena pengukuran kinerja instansi pemerintah dimaksudkan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat luas (Halim, 2005).

Kinerja telah menjadi salah satu kata kunci yang banyak dibicarakan diberbagai organisasi mulai dari organisasi perusahaan, pemerintahan, dan juga perguruan tinggi. Demikian juga kinerja masuk dalam aspek sosial ekonomi kemasyarakatan. Kondisi ini terlihat dari banyak organisasi yang memasukkan kata kinerja dalam visi dan misinya. Pencapaian kinerja tidak hanya diharapkan pada karyawan saja melainkan dalam jangka panjang diharapkan mampu meningkatkan kinerja kelembagaan (Rosmawati, 2011).

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah pengelolaan keuangan daerah (Rohman, 2009). Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat yaitu: “Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah”. Permendagri 59 Tahun 2007 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa keuangan daerah adalah sebagai berikut: “pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana publik harus dilakukan dengan sistem desentralisasi yang transparan, efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Apabila keuangan daerah dikelola dengan baik, maka tujuan dan target pemerintah yang telah disusun dan direncanakan sebelumnya dapat tercapai. Pencapaian tujuan menjadi salah satu bukti yang mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki kinerja yang baik.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kinerja pemerintah adalah sistem akuntansi keuangan daerah (Zulhendri, 2014). Pengertian dari sistem akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas-entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota atau provinsi).

Sistem akuntansi keuangan yang baik dapat menggambarkan bagaimana kinerja pemerintah daerah untuk menunjukan pencapaian yang dicapai. Agar kinerja dapat dilaksanakan, diperlukan sistem

akuntansi yang memadai, karena sistem akuntansi keuangan merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabilitas, transparansi, adil, efektif, dan efisien. Pengembangan sebuah sistem yang dianggap tetap untuk dapat diimplementasikan di daerah menghasilkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) diharapkan mampu mewujudkan tercapainya transparansi dan akuntabilitas. Dengan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) transparansi dan akuntabilitas yang diharapkan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dicapai, (Halim, 2007).

Pemerintah daerah selaku pengelola dana harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya dalam rangka menciptakan otonomi daerah. oleh karena itu diperlukan suatu sistem akuntansi dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang handal dan relevan agar dalam pelaporannya nanti dapat menghasilkan suatu informasi yang sehat dan dapat dipertanggung jawabkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Atmojo, 2010).

Pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah termasuk di dalamnya pertanggungjawaban anggaran. Pencapaian target anggaran merupakan salah satu yang diinginkan oleh mereka. Kinerja pemerintah daerah diukur melalui anggaran pendapatan. Seberapa baik kinerja pemerintah daerah akan terlihat dari realisasinya, semakin tinggi

realisasi dari suatu anggaran yang ditargetkan maka kinerja akan semakin baik.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penilaian kinerja pemerintah Kota Gorontalo. Ini juga dapat dilihat dari relialisasi APBD Kota Gorontalo pada tahun 2012-2016 yang mengalami fluktuasi. Adapun daftar APBD dan realisasinya serta capainnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Gorontalo Tahun 2012 s/d 2016

Tahun	Anggaran	Realisasi	Capaian
2012	633.711.171.576,00	588.400.495.656,53	93%
2013	742.942.448.874,00	675.337.872.413,59	91%
2014	798.051.224.943,00	754.961.985.637,20	95%
2015	931.276.931.408,00	892.006.038.781,32	96%
2016	1.033.898.351.956,00	948.313.978.857,42	92%

(Sumber: Data Badan Keuangan 2017)

Dilihat dari capaian membuktikan bahwa kinerja dari pemerintah daerah Kota Gorontalo masih jauh dari harapan masyarakat terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang selama lima tahun terakhir dinilai belum efektif, karena belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Gorontalo, bahwa target pencapaian realisasi adalah 100% hal ini dipertegas oleh Kasubag Akuntansi DPPKAD Kota Gorontalo Ronal Idrus. Dimana realisasi pendapatan pada tahun 2012 capaianya sebesar 93% pada tahun 2013 menurun menjadi 91% kemudian pada

tahun 2014 naik menjadi 95% kemudian pada tahun 2015 mencapai peningkatan 96% sedangkan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 92%.

Berdasarkan permasalahan yang ada di Kota Gorontalo ini dapat terlihat bahwa kinerja pemerintah daerah masih kurang efektif. Hal ini terbukti menyebabkan program dan kegiatan yang dijalankan tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu sehingga dapat berpengaruh pada kinerja yang ada di Kota Gorontalo.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian sebelumnya diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Vivid (2017) penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan *good governance* secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Selanjutnya Yusmalizar (2014) hasil penelitiannya menunjukan bahwa pengawasan intern berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja pemerintah daerah. Lebih lanjut hasil penelitian Atmojo (2010) penelitian menyimpulkan bahwa faktor pengelolaan keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah, tetapi pada faktor pemahaman sistem akuntansi

keuangan daerah, dan sistem peloporan tidak berpengaruh terhadap kinerja satuan perangkat daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah" dimana yang membedakan penelitian dengan penelitian terdahulu yaitu hubungan antar variabel, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Annisa (2017) meneliti tentang pengaruh pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah di SKPD Kota Pekanbaru dan pada penelitian ini peneliti meneliti tentang **Pengaruh Pengelolaan Keuangan Dearah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, yang berlokasi penelitian di DPPKAD Kota Gorontalo.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah penelitian, sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas.

2. Kurang efektif dan efisiennya kinerja pemerintah Daerah Kota Gorontalo dalam mengelola keuangan daerah sehingga mengakibatkan hasil penilaian kinerja belum maksimal selama 5 tahun terakhir.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Gorontalo?
2. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Gorontalo?
3. Apakah pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara simultan terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Gorontalo?

1.4 Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kota Gorontalo.

3. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah Kota Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam tata pemerintahan, dan penelitian ini diharapkan juga dapat menambah wawasan dan sebagai referensi bagi penelitian yang sama dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

   Bagi pembaca pada umumnya diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat dalam membangun bangsa ini lebih baik kedepannya dan juga sebagai literatur untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian selanjutnya untuk pemerintah daerah itu sendiri, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah Kota Gorontalo.